

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dimana dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dari tiga 3 (tiga) tahap pengelolaan alokasi dana desa tersebut, yakni :

Pada tahapan perencanaan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut dana yang dianggarkan sudah maksimal dan memenuhi tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri, namun yang menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan tersebut adalah kegiatan musrembang (musyawarah pembangunan desa) yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang tersebut partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh Perangkat Desa Watu Baur kepada masyarakat Desa Watu Baur.

Tahapan kedua pengelolaan alokasi dana desa yaitu tahap pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan ini berdasarkan hasil penelitian yaitu pada laporan realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan pembangunan sudah terealisasi dengan baik, namun yang menjadi masalah dalam tahapan ini adalah kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Watu Baur masih kurang efektif.

Dan pada tahapan ketiga pengelolaan alokasi dana desa yaitu tahap pertanggungjawaban, yakni laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara desa sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten. Namun berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi masalah adalah dimana penyusunan Laporan Pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Watu Baur serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Watu Baur. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Watu Baur yaitu :

- 1.) Sumber Daya Manusia
- 2.) Informasi
- 3.) Partisipasi Masyarakat

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melaksanakan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Watu Baur kepada masyarakat Desa Watu Baur.
2. Sebagai Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Watu Baur melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian dana desa sesuai yang diharapkan.
3. Sebagai Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yakni pada tahap ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban, dimana pada pertanggungjawaban ini laporan

pertanggungjawaban harus dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah Desa Watu Baur dan perlunya evaluasi bersama masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Sebagai Pemerintah Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, Riko. 2012. *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 201*
- Danu Wisakti, 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta : Kurnia Alam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset
- Fattah, Nanang.(2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*.Bandung : Remaja Rosda Karya
- Hernowo, Basah.2010. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*.www.Bappenas.go.id
- Muljana, B. S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan fokus Repelita V*. Jakarta : UI-Press.
- Muntah anah, Siti.*Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi.
- Ndraha, Taliziduhu, 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai No. 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Manggarai
- Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Propresional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai
- Prasetyanto PP, Eko. 2012. *Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia*.Disertasi.IPB,Bogor.
- Raum Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur*. *Ejournal ilmu pemerintahan* 2015 : 3 (4) 1623-1636, di akses pada 1 Mei 2016.

- Saputra I Wayan, 2014. *Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. Jurnal Pendidikan Ekonomi
- Sukanto, Azwardi. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Journal Economic Development.
- Suksesi. 2007. *Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan*. Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id/wp>.
- Sumiati. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Di akses Pada 13 mei 2016
- Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *Ejournal pemerintahan integrative*, I (1) 51-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah*.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.